

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setelah tertunda-tunda dan menimbulkan ketidakpastian serta diprotes berbagai kalangan, akhirnya pemerintah mengumumkan kenaikan BBM. Deklarasi kenaikan BBM tersebut terjadi pada Senin (28 Februari 2005). Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk mengatur kenaikan tersebut, yaitu Peraturan Presiden Nomor 22 tahun 2005. Kompas menyebutkan bahwa peraturan tersebut berlaku mulai hari Selasa, 1 Maret 2005 pukul 00.00 WIB. (Kompas, 1 Maret 2005, p.1).

Pemerintah menyebutkan empat alasan kenaikan harga BBM. Empat alasan tersebut yakni subsidi BBM memberatkan APBN, subsidi BBM kurang mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat, menyebabkan penyelundupan serta pengoplosan BBM, tidak mendorong pemakaian energi alternatif karena masyarakat cenderung boros memakai BBM. Empat alasan tersebut disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada saat membacakan pengumuman kenaikan harga BBM. Dijelaskan, subsidi BBM memberatkan APBN karena harga minyak internasional mengalami kenaikan, sehingga jika subsidi BBM tidak dikurangi maka akan memberatkan APBN. Kedua, subsidi BBM kurang mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat, karena sebagian besar pemakaian subsidi BBM bukanlah untuk keperluan rakyat kecil, melainkan pihak-pihak tertentu saja, misalnya perusahaan-perusahaan besar. Sehingga dengan demikian menyebabkan APBN terkuras dan tidak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur bagi kesejahteraan rakyat. Ketiga, mendorong terjadinya penyelundupan serta pengoplosan BBM, karena jumlah subsidi yang tidak terkontrol. Terakhir, karena masyarakat sudah terbiasa dengan subsidi yang ada (tergantung) sehingga energi alternative tidak mendapat perhatian.

Keputusan yang disampaikan oleh pemerintah tersebut langsung mendapatkan respon dari berbagai kalangan masyarakat, diantaranya adalah masyarakat intelektual (mahasiswa, pengajar, praktisi), tokoh LSM, tokoh masyarakat dan agama, dan rakyat kecil (rakyat yang berpendapatan dan pendidikan rendah, serta tinggal dirumah yang sangat sederhana). Seperti yang

terjadi di Jakarta, persis pada hari pertama kenaikan BBM diberlakukan, ratusan mahasiswa dari BEM se-Jabotabek berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Istana Merdeka. Kemudian pada hari-hari berikutnya disusul dengan gelombang unjuk rasa oleh BEM dari berbagai wilayah. BEM tersebut diantaranya adalah Universitas Indonesia, STIE Rawamangun, Universitas Budi Luhur, dan mahasiswa dari Sulawesi Selatan yang mendatangi gedung DPRD mereka. (Kompas, 1 Maret 2005, p.1).

Peran mahasiswa dalam kasus ini adalah sebagai pejuang atas hak rakyat kecil. Perjuangan tersebut terlihat dari alasan-alasan mereka dalam menyerukan penolakan terhadap kenaikan harga BBM. Mahasiswa mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM telah memberatkan rakyat. Keberatan tersebut dikarenakan kenaikan BBM akan berdampak langsung pada kehidupan rakyat kecil. Kemudian mahasiswa juga meragukan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk kepentingan rakyat kecil –mereka yang berpendapatan rendah. Mahasiswa memprediksi bahwa dana tersebut tidak akan sampai karena masih banyaknya kasus korupsi dan utang luar negeri.

Alasan-alasan tersebut diatas, benar adanya. Ketika harga BBM dinaikkan, kehidupan rakyat kecil yang terkena dampak langsungnya. Dampak tersebut diantaranya adalah kebutuhan sehari-hari mereka membengkak (biaya pangan, dan biaya transportasi). Memang pemerintah tidak ”mengutak-atik” harga minyak tanah rumah tangga, namun bagaimanapun kebutuhan rakyat kecil bukanlah hanya sebatas minyak tanah. Untuk melangsungkan kehidupannya, mereka masih bergantung pada pihak lain (sopir bemo, perusahaan-perusahaan bahan makanan, dan lainnya). Pihak-pihak tersebut telah terkena secara langsung dampak dari kenaikan harga BBM. Jadi tetap saja kenaikan harga BBM berdampak buruk bagi rakyat kecil.

Dari gambaran tersebut terlihat jelas bahwa kasus kenaikan harga BBM merupakan kasus yang mempengaruhi kehidupan rakyat kecil pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Pers Indonesia sudah pasti tidak menutup mata ataupun telinga atas kasus ini. Hal ini terlihat dari penyampaian informasi mengenai kasus kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pers selama hampir satu bulan penuh, yakni selama (31 Maret 2005).

Tabel1. Jumlah Berita Halaman Pertama Mengenai Kenaikan Harga BBM Kompas & Jawa Pos - Maret 2005

| Media Cetak | Berita Kenaikan Harga BBM Pada Halaman Pertama Surat Kabar |
|-------------|--|
| Kompas | 38 <i>item</i> berita (judul berita) |
| Jawa Pos | 20 <i>item</i> berita (judul berita) |
| Total | 58 <i>item</i> berita (judul berita) |

Sumber: Olahan Penulis

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kompas menyajikan *straight news* (berita langsung) sebanyak 38 *item* sedangkan Jawa Pos menyajikan sebanyak 20 *item* *straight news*, dalam periode satu bulan (1-31 Maret 2005).

Menyinggung tentang keberadaan pers dalam menyampaikan informasi mengenai fakta-fakta sosial yang tengah terjadi, Mochtar Lubis mengatakan bahwa seluruh pers di mana pun harus mengutamakan kepentingan umum. Bukan kepentingan golongan-golongan berkuasa atau golongan kaya saja. Semakin banyak rakyat kita yang masih miskin, pers harus semakin berjuang untuk kepentingan mereka. (Lubis, 1993). Pernyataan yang senada juga diungkapkan oleh Jacob Utomo, kebebasan pers adalah merupakan lembaga sosial yang memiliki kebebasan dalam menyuarakan masalah-masalah dan aspirasi-aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan untuk mengkritik kebijaksanaan pemerintah serta pelaksanaannya (yang dijamin oleh UUD '45 pasal 28).

Siregar menjelaskan bahwa kebebasan pers diatur oleh prinsip kedua jurnalisme, yaitu prinsip keseimbangan dan keberpihakan. Kedua prinsip tersebut merupakan dua sisi mata koin kerja jurnalisme, yang satu menjadi penyebab yang lainnya. Keseimbangan menciptakan ketidakberpihakan, dan ketidakseimbangan menciptakan keberpihakan. Keseimbangan dan keberpihakan dapat dilihat dari kandungan dan konteks fakta sosial. Pada dasarnya fakta sosial menyangkut interaksi sosial pihak-pihak (dua atau lebih) dalam struktur sosial. Jika individu yang berinteraksi itu berada pada jajaran kekuasaan yang sama, maka posisi kedua pihak seimbang. Namun jika salah satu individu memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan pihak lain, maka terjadilah ketidakseimbangan. (Siregar, 2001, p. 175). Hal ini sama seperti yang dialami oleh rakyat. Rakyat tidak berada pada jajaran yang sama dengan pemerintah dalam kasus kenaikan harga BBM ini.

Pemerintah memiliki kekuasaan yang lebih besar, kebijakan kenaikan harga BBM mau atau tidak mau harus diikuti oleh rakyat. Padahal kebijakan tersebut berdampak buruk pada kehidupan rakyat.

Dalam perspektif yang bertolak dari asumsi dasar tersebut diatas, kembali Siregar menjelaskan bahwa jurnalis dituntut membangun sudut pandang dengan memberi perhatian kepada orang yang berada dalam situasi ketidakseimbangan dan ketidaksamaan. Disinilah terjadi pergeseran keseimbangan menjadi ketidakseimbangan, yang pada akhirnya melahirkan keberpihakan.

Dalam membangun sudut pandang tersebut, mereka merealisasikan sumber daya yang ada untuk merekonstruksi realitas sosial yang mereka lihat, dengar, dan amati. Hasil rekonstruksi ini mereka kemas dalam bentuk berita dan mereka siarkan melalui media massa tempat mereka bekerja. (Abrar, 1997, 57-58). John C. Meril menjelaskan jurnalisme obyektif adalah tidak mungkin. Karya jurnalistik pada dasarnya subjektif, mulai dari pencarian berita, peliputan, penulisan sampai penyuntingan berita. Jadi rekonstruksi yang dilakukan tersebut merupakan bentuk subjektivitas media, yang sama dengan artinya melahirkan keberpihakan media.

Berdasarkan pengertian tersebut, pemberitaan mengenai kenaikan harga BBM pada bulan Maret 2005, dipastikan memiliki subyektivitas, yang melahirkan keberpihakan, karena bagaimanapun pers dikelola oleh orang-orang yang bekerja secara kolektif dan saling bahu-membahu. (Effendy, 1993, p. 22).

Pada penelitian kali ini, penulis akan meneliti dua media cetak yakni Kompas dan Jawa Pos. Kedua media cetak ini merupakan surat kabar yang memiliki oplah yang terbesar diantara oplah surat kabar lainnya yang ada di Indonesia (Redaksi, 2005), juga merupakan media informasi yang memiliki *impact* besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Eksistensi mereka dalam bidang jurnalistik dan keberadaan mereka sebagai media yang memiliki *impact* yang besar, menggelitik penulis untuk mengetahui seberapa besarkah keberpihakan kedua media cetak tersebut terhadap kasus kenaikan harga BBM (peristiwa nasional). Untuk melihat seberapa besar dan bagaimanakah keberpihakan kedua media cetak tersebut dalam kasus kenaikan harga BBM, penulis akan melakukan analisis isi media secara kuantitatif.

1.2. Perumusan Masalah

Bertolak dari pemikiran bahwa media memiliki subjektivitas dalam mengemas sebuah realitas menjadi berita, maka dirumuskanlah pokok permasalahan:

“Seberapa besar dan bagaimanakah keberpihakan Pemberitaan Kompas dan Jawa Pos dalam kasus kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)?”

1.3. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

- a. Surat kabar yang diteliti adalah Kompas dan Jawa Pos periode Maret 2005. Kedua surat kabar tersebut merupakan surat kabar nasional yang memiliki oplah terbesar di Indonesia. (Redaksi Jawa Pos & Kompas, 2005)
- b. Pemberitaan yang diteliti pada kedua surat kabar tersebut adalah berita-berita langsung atau *straight news* pada halaman pertama (*front page*). Berita-berita yang diteliti adalah berita yang membahas kenaikan harga BBM yang membahas tentang pro dan kontra terhadap *issue* kenaikan harga BBM dan sebab-akibat kenaikan harga BBM, yang termuat pada halaman satu masing-masing surat kabar yang diteliti.
- c. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analisis isi.
- d. Penelitian ini hanya menjelaskan hasil data yang diperoleh berdasarkan analisis isi kuantitatif secara deskriptif.

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui besarnya keberpihakan Jawa Pos dan Kompas dalam kasus kenaikan harga BBM.
2. Mengetahui bagaimanakah keberpihakan Jawa Pos dan Kompas dalam pemberitaan kasus BBM tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi masyarakat intelektual. Berikut adalah beberapa manfaat akademis dari penelitian ini :

- Melalui penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat secara umumnya, dan mahasiswa yang belajar bidang sosial dan komunikasi.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap masalah yang sama di masa yang akan datang.

1.5.2 Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan bahwa keberpihakan pada media cetak dapat diidentifikasi.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai perangkat konsep dan teori yang digunakan dalam mengukur keberpihakan media cetak.

1.5.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan kepada media-media yang diteliti, bahwa mereka sudah atau belum menerapkan standar jurnalisme yang netral.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi yang berupa penelitian ini, bersistematika sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| Bab I | Pendahuluan Bab ini terdiri dari sub-sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat yang diharapkan dari penelitian, serta sistematika penulisan. |
| Bab II | Landasan Teori Bab ini menguraikan berbagai teori yang akan digunakan sebagai dasar atau landasan pembahasan permasalahan |

selama proses penelitian. Adapun teori yang dipakai mengenai keberpihakan, pers, dan pemberitaan.

Bab ini terdiri dari sub-sub bab, yaitu: Teori/ konsep, nisbah antar konsep, dan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini terdiri dari sub-sub bab, yaitu: definisi konseptual, definisi operasional, jenis penelitian, jenis sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisa data.

Bab IV Subyek dan Obyek Penelitian

Bab ini berisi tentang tinjauan umum media cetak yang diteliti, yaitu tinjauan umum dari media Kompas dan Jawa Pos.

BAB V Analisa Masalah

Bab ini berisi uji reabilitas perangkat kategori yang digunakan dalam penelitian, dan perhitungan terhadap data yang telah dikumpulkan beserta uraian analisisnya.

Bab VI Simpulan dan Saran

Bab ini berisi kesimpulan penelitian, ditambah dengan beberapa saran agar hasil penelitian dapat lebih bermanfaat bagi para pembaca.